



# **PPID** Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

---

**KELURAHAN PASAR BARU  
KECAMATAN SAWAH BESAR  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

## **LAPORAN TAHUNAN PPID**

**KELURAHAN PASAR  
BARU TAHUN 2023**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT karena berkat Rahmat-Nya Laporan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kelurahan Pasar Baru Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik sebagaimana yang telah direncanakan, sesuai dengan yang diamatkan Undang – Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Laporan ini merupakan hasil dari seluruh pelaksanaan rangkaian pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat oleh PPID Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Akhirnya disampaikan terima kasih kepada seluruh staf dan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penyusunan laporan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kelurahan Pasar Baru Tahun 2023, yang mengumpulkan data – data yang dibutuhkan untuk pembuatan laporan ini.

Laporan ini bertujuan memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan, pelayanan, pendokumentasian pelayanan public yang dicapai serta hambatan kendala yang dilalui. Diharapkan adanya saran dan masukan yang membangun untuk pelaksanaan peningkatan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Kelurahan Pasar Baru.

Jakarta, 17 September 2024  
Lurah Kelurahan Pasar Baru

Arbi Novianto, SKM  
NIP. 197011021997031004

# **LAPORAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KELURAHAN PASAR BARU TAHUN 2023**

## **I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK**

### **A. Kebijakan**

Informasi merupakan salah satu hal terpenting bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari di kehidupannya. Peranan besar Pemerintah dalam era keterbukaan informasi publik saat ini menjadi fondasi penting lahirnya transparansi, partisipasi, kejelasan, dan kepastian informasi di masyarakat. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, harus mengakomodir pemenuhan hak dasar bagi masyarakat khususnya dalam memperoleh informasi yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Keterbukaan informasi menjadi salah satu syarat dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berlaku bagi seluruh instansi pemerintah, termasuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Berbagai upaya dilakukan untuk memaksimalkan pelayanan informasi kepada masyarakat di antaranya melakukan perubahan/inovasi digital dalam bekerja, termasuk dalam bidang layanan informasi publik. Oleh karena itu, dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tingkat daerah, maka Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta (Pergub) Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik, agar pelayanan informasi kepada Masyarakat dapat lebih optimal.

Pergub Nomor 175 Tahun 2016 secara garis besar menjelaskan mengenai Kelembagaan PPID, Jenis Informasi Publik, Alur Mekanisme Pelayanan Informasi Publik, Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pelayanan informasi melalui PPID. Selanjutnya penguatan Kelembagaan PPID juga dilakukan dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta (Kepgub) Nomor 839 Tahun 2017 tentang PPID Provinsi DKI Jakarta dan Kepgub Nomor 885 Tahun 2017 tentang Tim Pertimbangan PPID Provinsi DKI Jakarta.

Sejak tahun 2023 seluruh dunia termasuk Indonesia masih menghadapi tantangan Pandemi Covid-19 yang mengharuskan masyarakat menerapkan protokol kesehatan, terutama dalam hal pembatasan jarak fisik. Berbagai upaya telah dilakukan Kelurahan Pasar Baru sebagai perpanjangan tangan dari Pemprov DKI Jakarta dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Penerapan protokol kesehatan dan percepatan vaksinasi kepada masyarakat menjadi prioritas demi terciptanya *herd immunity*. Meskipun pandemi telah mengharuskan perkantoran melaksanakan bekerja dari rumah (WFH), Kelurahan Pasar Baru tetap melaksanakan pelayanan informasi terhadap masyarakat pada jam kerja dengan menerapkan protokol kesehatan. Mengoptimalkan layanan berbasis daring (*online*) melalui *website jakevo.jakarta.go.id* Kelurahan Pasar Baru hingga saat ini masih terus berkomitmen melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik demi membantu masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, di antaranya penyelenggaraan pemerintahan, kesehatan, sosial, maupun ekonomi dengan berpedoman pada tata kelola kehidupan baru.

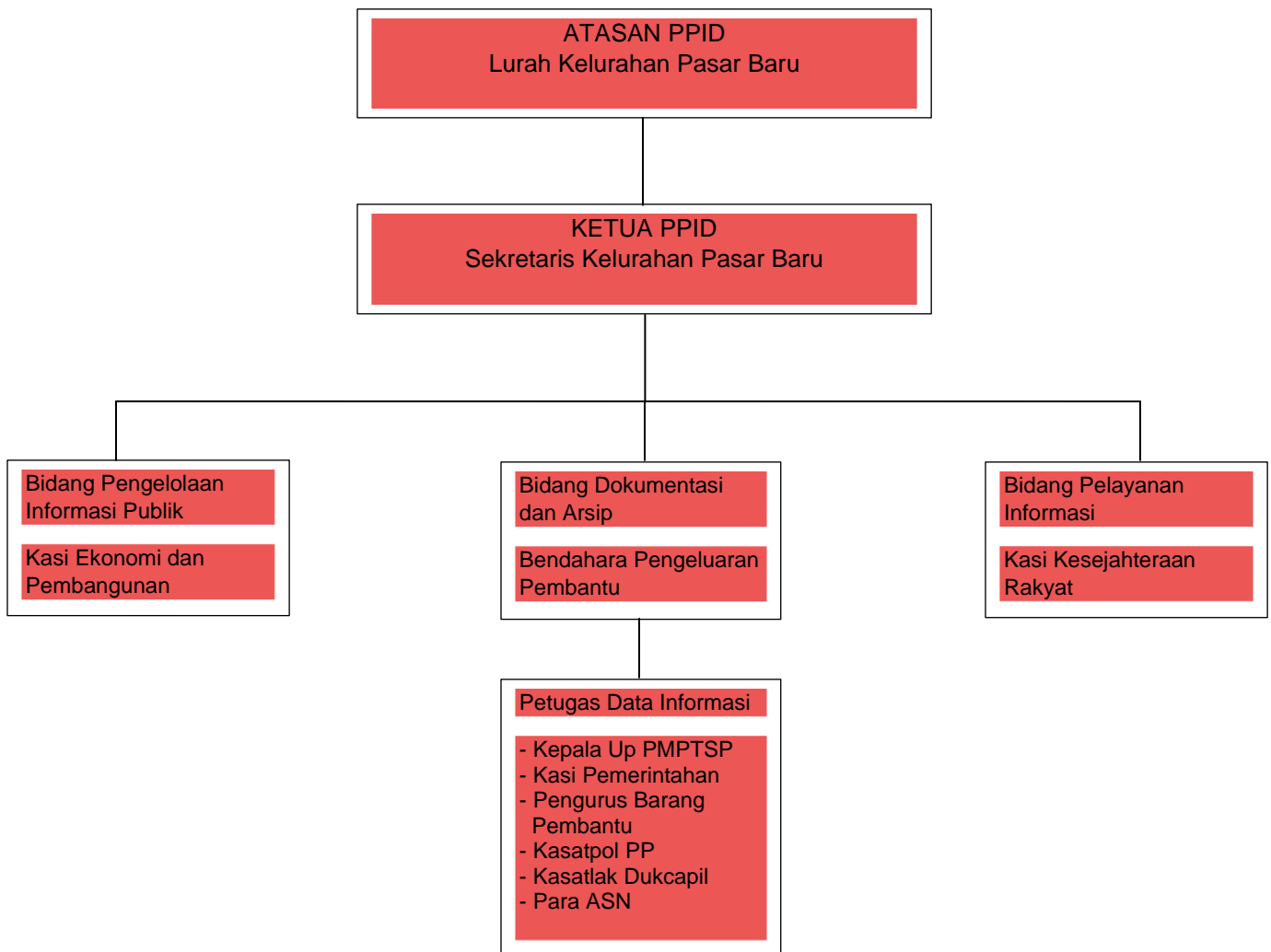
Informasi merupakan salah satu hal terpenting bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari dalam kehidupannya. Peranan besar Pemerintah dalam era keterbukaan informasi publik saat ini menjadi fondasi penting lahirnya transparansi, partisipasi, kejelasan, dan kepastian informasi di masyarakat. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, harus mengakomodir pemenuhan hak dasar bagi masyarakat khususnya dalam memperoleh informasi yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Keterbukaan informasi menjadi salah satu syarat dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berlaku bagi seluruh instansi pemerintah, termasuk kelurahan Pasar Baru. Berbagai upaya dilakukan untuk memaksimalkan pelayanan informasi kepada masyarakat diantaranya melakukan perubahan/inovasi digital dalam bekerja, termasuk dalam bidang layanan informasi publik. Oleh karena itu, dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tingkat daerah, maka Kelurahan Pasar Baru Kecamatan sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta telah mengimplementasikan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta

(Pergub) Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik, agar pelayanan informasi kepada masyarakat dapat lebih optimal. Sebagai tindak lanjut dari kebijakan tersebut, diterbitkan Surat Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat.

## B. Struktur Organisasi

PPID Kelurahan Pasar Baru merupakan PPID pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk untuk membantu PPID Provinsi DKI Jakarta dalam pelayanan informasi dan dokumentasi publik. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 PPID pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah berada pada Kelurahan Pasar Baru tergambar seperti berikut :



### **C. Visi dan Misi**

Pada pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik melalui PPID, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat tetap berpatokan kepada visi dan misi yang telah ditetapkan demi optimalisasi keterbukaan informasi kepada seluruh warga masyarakat. Adapun Visi PPID Kelurahan Pasar Baru yaitu “Menciptakan Kelurahan Pasar Baru yang modern, manusiawi, aman, tertib dengan kepemimpinan dan pemerintahan yang bersih dan orientasi melayani.” Untuk mewujudkan Visi tersebut PPID Kelurahan Pasar Baru mempunyai Misi sebagai berikut :

- Membangun pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik;
- Menumbuh kembangkan budaya cepat tanggap (responsive) terhadap permasalahan yang ada di Masyarakat;
- Mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan berbagai masalah di wilayah.

### **D. Maklumat PPID**

PPID Kelurahan Pasar Baru berupaya memberikan pelayanan informasi publik dan berkomitmen untuk :

- 1) Memberikan pelayanan informasi yang prima berdasarkan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan juga turut mewujudkan misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berorientasi pada pelayanan publik;
- 2) Memberikan kemudahan kepada publik dalam mendapatkan informasi yang diperlukan dengan murah dan sederhana;
- 3) Menyediakan dan memberikan informasi publik yang dikuasai secara akurat, benar dan tidak menyesatkan;
- 4) Menyediakan daftar informasi publik untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan;

- 5) Bertindak proaktif dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat serta menjamin seluruh informasi publik dan fasilitas pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 6) Menyiapkan ruang dan fasilitas yang nyaman dan tertata baik;
- 7) Bersikap adil, tidak diskriminatif dan berperilaku sopan santun dalam memberikan layanan informasi publik;
- 8) Menyiapkan petugas informasi yang berdedikasi dan siap melayani;
- 9) Tidak melakukan pungutan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dalam memberikan layanan informasi publik.

## **II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK**

### **A. Sarana dan Prasarana**

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik melalui PPID Provinsi DKI Jakarta telah dilengkapi dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Fasilitas yang tersedia dalam mendukung pelayanan informasi publik, terdiri dari:

1. Ruang Desk/Meja Layanan Informasi Publik untuk memudahkan pemohon informasi menyampaikan permohonan informasi publik (foto pada lampiran). Ruang dilengkapi sarana dan prasarana, sebagai berikut:
  - a) Kursi tamu;
  - b) Meja layanan informasi dan kursi petugas data dan informasi;
  - c) 1 (satu) unit Personal Computer (PC) yang terkoneksi dengan internet;
  - d) 1 (satu) unit telepon; dan
  - e) 1 (satu) unit lemari arsip.
2. Akses pelayanan informasi kepada pemohon informasi publik yang datang langsung ke meja layanan informasi,
  - 1) Maklumat PPID
  - 2) Informasi Publik (Daftar Informasi Publik Berkala, Serta-merta, Tersedia Setiap Saat)
  - 3) Standar Layanan
    - a. SOP PPID
    - b. Waktu & Biaya
    - c. Alur Mekanisme Pelayanan Informasi Publik
    - d. Alur Mekanisme Pengelolaan Keberatan Informasi Publik
    - e. Prosedur Penanganan Sengketa Informasi
    - f. Prosedur Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi



- 4) Laporan
  - a. Laporan PPID
- 5) Permohonan
  - a. Formulir Permohonan Informasi
  - b. Formulir Permohonan Kebaratan Informasi

## **B. Kondisi Sumber Daya Pengelola**

Kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik meliputi proses yang dimulai dari pengumpulan data, pengumpulan bahan informasi, penyusunan draft jawaban permohonan informasi publik, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, serta pelayanan informasi publik hingga ke proses sengketa informasi publik. Sesuai dengan Keputusan Lurah Kelurahan Pasar Baru Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Kelurahan Pasar Baru dibantu oleh beberapa OPD/Bagian yang ditetapkan, yaitu: Bidang Pelayanan Informasi Publik, Bidang Dokumentasi dan Arsip, Bidang Pengelolaan Informasi Publik, serta Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Petugas Data dan Informasi Perangkat ini dituntut untuk aktif dalam setiap kegiatan terkait keterbukaan informasi publik serta terus mempelajari dan meningkatkan pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang tersedia dan sumber bacaan lain yang relevan.

## **C. Anggaran dan Penggunaannya**

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kelurahan Pasar Baru Tahun Anggaran 2023, belum tersedia anggaran yang secara khusus ditujukan untuk kegiatan PPID. Namun demikian, hal ini tidak menjadi penghambat dalam pelaksanaan kegiatan PPID di Kelurahan Pasar Baru

### **III. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DANDOKUMENTASI PUBLIK**

#### **A. Pengelolaan dan Pendokumentasian Informasi Publik**

Pada pelaksanaan tugas pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik melalui PPID Sekretariat Kelurahan Pasar Baru dengan didukung oleh produsen data dari 8 (delapan) Bagian yang terdapat di Kelurahan Pasar Baru. Daftar Informasi Publik (DIP) dipublikasi melalui media social Instagram Kelurahan\_Karanganyar diharapkan masyarakat dapat mengakses informasi secara online dengan mudah. Pengelolaan DIP tersebut telah berjalan, namun belum dilaksanakan secara maksimal karena keterbatasan jumlah sumber daya pengelola informasi atau petugas data dan informasi di Kelurahan Pasar Baru

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait keterbukaan informasi publik dan pengelolaan DIP tersebut, maka PPID Kelurahan Pasar Baru terus aktif mengikuti sosialisasi yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta. Sosialisasi tersebut yang diikuti baik secara online melalui aplikasi *Zoom Cloud Meeting* ataupun secara luring.

#### **B. Pelayanan Informasi Publik**

Pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi juga disediakan secara langsung melalui *desk/meja* pelayanan informasi dan disediakan setiap hari kerja pada pukul 09.00 s/d 15.30 WIB. Pemohon informasi dapat menyampaikan permohonan informasinya secara langsung, secara online melalui portal/website yang terpusat pada PPID Provinsi DKI Jakarta.

Keseluruhan pelayanan informasi publik pada PPID Kelurahan Pasar Baru telah disesuaikan dengan alur mekanisme dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah tersedia. Namun sampai saat ini belum terdapat permohonan informasi publik yang secara langsung diminta masyarakat melalui PPID Kelurahan Pasar Baru

### C. Rincian Pelayanan Informasi Publik di PPID Kelurahan Pasar Baru

Rekapitulasi Daftar Pelayanan Informasi Publik di PPID PPID Kelurahan Pasar Baru pada Tahun 2023 berjumlah nihil, dapat dilihat pada table sebagai berikut:

#### LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASIKELURAHAN PASAR BARU TAHUN 2023

BULAN	PEMOHON INFORMASI			MEKANISME PERMOHONAN		JENIS INFORMASI YANG DIMINTA					PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI					SENKETA/ INFORMASI
	Individu	Badan Hukum	Kelompok Orang	Langsung	Tidak Langsung (Surat/Email/ Fax)	Laporan Keuangan	Laporan Tahunan	Kontrak Kerja	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Lain-Lain	JUMLAH PERMOHONAN YANG DIKABULKAN		JUMLAH PERMOHONAN YANG DITOLAK			
											Sebagian	Seluruhnya	Dikecualikan	Tidak Dikuasai	Belum didokumentasikan	
1. JANUARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. FEBRUARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. MARET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. APRIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. MEI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6. JUNI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7. JULI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8. AGUSTUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9. SEPTEMBER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10. OKTOBER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11. NOVEMBER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12. DESEMBER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
JUMLAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

### D. Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta

Sepanjang tahun 2022 PPID PPID Kelurahan Pasar Baru belum pernah mendapatkan sengketa informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.

### E. Kendala Internal dan Eksternal dalam Pelayanan Informasi Publik

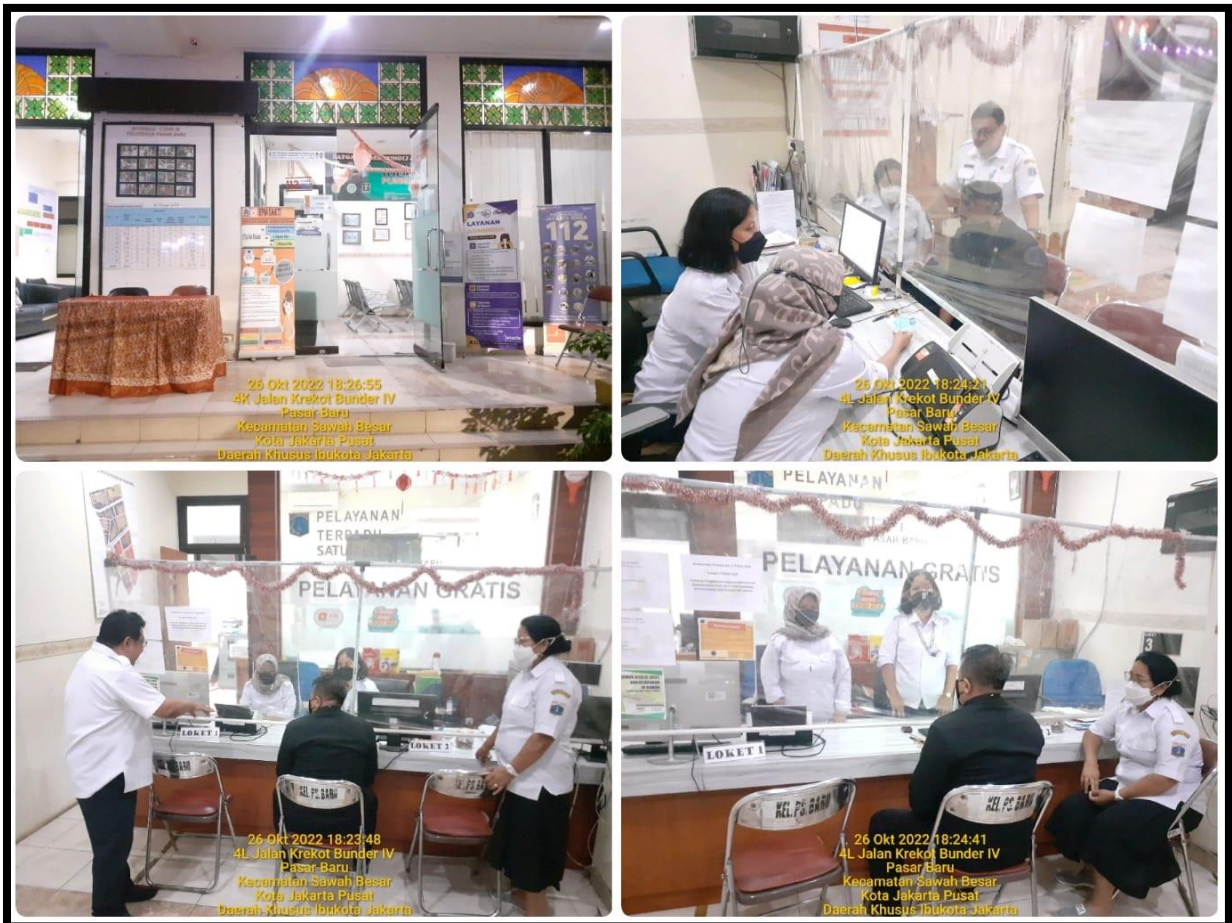
Tidak terdapat kendala yang menonjol baik dari internal maupun eksternal dalam pelayanan informasi publik di PPID Kelurahan Pasar Baru. Sebagai usulan untuk peningkatan pelayanan pemberdayaan Sumber Daya Manusia harus terus ditingkatkan.

## F. Inovasi dan kolaborasi dalam Pelayanan Informasi Publik

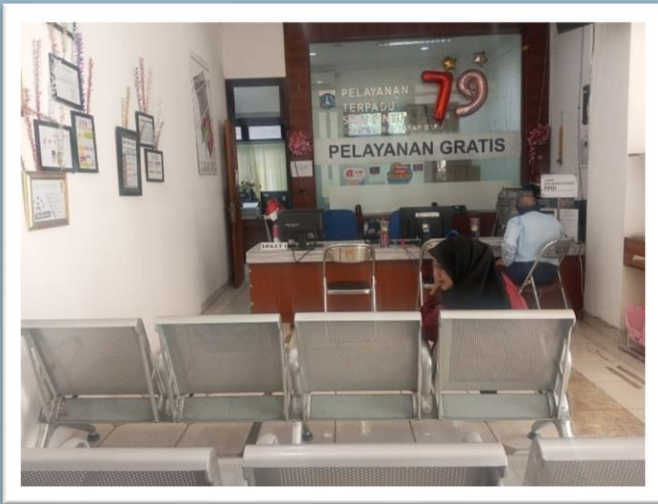
Inovasi dan kolaborasi dalam pelayanan informasi publik di PPID Kelurahan Pasar Baru dilakukan secara terus menerus dengan berbagai pihak. Dalam hal pemenuhan produksi data informasi publik, kolaborasi antar Bagian di PPID Kelurahan Pasar Baru dilakukan dengan baik, penyebaran informasi melalui berbagai kanal yang informatif, seperti :

- Pelayanan Rabu Petang

Pelayanan dan Pengaduan yang dilaksanakan setiap minggu ke 2 dan ke 4 setiap bulannya di Kantor Kelurahan Pasar Baru, yang bertujuan untuk memberikan layanan prima bisa menjangkau masyarakat lebih luas dan lebih dekat dengan masyarakat.



## RUANG PPID KELURAHAN PASAR BARU



## Menyediakan Akses Difabel di Area Luar Gedung

